

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dimulai dengan lahir dan perkembangan pesat Bank syariah, kemudian bisa dikatakan itu sebagai stimulus lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah tak terkecuali koperasi syariah. yaitu seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilandaskan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip yang didasarkan kepada ajaran *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 19

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.²

Pada saat ini koperasi syariah diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, saat ini berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi dan 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Koperasi menjadi perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi *buffer* saat perekonomian Indonesia dilanda krisis, Pertumbuhan koperasi di Indonesia saat ini dinilai sangat pesat, hal ini dikarenakan koperasi diyakini sebagai penopong utama bagi usaha rakyat kecil di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Karena tidak dapat disangkal negara Indonesia sebagian besar atau hampir 70% rakyat Indonesia hidup di daerah pedesaan dan mereka memproduksi kira-kira 40% dari produk domestiknasional bruto. Jelas sektor pedesaan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Kegiatan

² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung:ALFABETA cv, Juni, 2014), 164-165

ini biasanya berupa usaha pertanian kecil pangan dan kegiatan pengolahan hasil pertanian dll.³

Dalam negara terdapat peraturan pemerintahan pusat maupun daerah, dalam pemerintahan daerah mempunyai sistem pemerintahan daerah masing-masing yang mana juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara pemerintah yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan *training ground* serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Didasari atau tidak, sistem pemerintah daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat pada pemerintah pusat.

Peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi ini dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Karna koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara anggotanya.⁴Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah.

³ Farid Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, edisi ke-2*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta), 407.

⁴ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia (Edisi kedua)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Januari, 2013), 26.

Pembangunan ekonomi berbasis sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sangat erat dengan ekonomi kerakyatan karena di dalamnya terdapat sistem ekonomi yang berbasis kekuatan rakyat. Pembangunan ekonomi berorientasi pada kerakyatan sejatinya melahirkan ketahanan ekonomi di segala bidang.

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai peran untuk mengembangkan koperasi syariah. Seperti halnya di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan identik dengan sebutan kota soto, namun selain itu kabupaten Lamongan juga terkenal dengan sebutan kota santri, sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam sehingga koperasi syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lamongan karena koperasi syariah ini jaringan operasinya berada pada desa yang akan memudahkan masyarakat nantinya.

Peran koperasi dan UMKM sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam perkembangannya, pertumbuhan koperasi dan UMKM selama ini belum sepenuhnya menampilkan wujud dan perannya seperti yang diharapkan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan demikian diperlukan peranan pemerintah agar koperasi dan UMKM dapat tumbuh dan berkembang, pemerintah mempunyai kewajiban

untuk menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha kecil baik melalui bimbingan atau pemberdayaan kepada koperasi.⁵

Pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 8 program aksi Bupati Lamongan yaitu mengalokasikan dana sebesar 25.000.000 perdesa untuk pengembangan desa melalui koperasi syariah. Koperasi syariah yang ada di Lamongan saat ini berjumlah 188 yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, dan sebagian besar beranggotakan wanita yang mengikuti organisasi seperti *fatayat* dll.

Dinas koperasi dan Usaha Mikro memiliki tugas menjadi fasilitator dan katalisator atau untuk membina, sosialisasi, memperluas jaringan kerja serta mendata guna berjalannya program-program yang telah disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dan untuk kesejahteraan rakyat bersama. Pengaruh dukungan pemerintah dalam suatu lembaga sangat dibutuhkan agar dapat bertahan lama dan rencana yang telah dibuat bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang bekerja sama dengan koperasi syariah yang bertujuan untuk lebih mengembangkan koperasi syariah dan membantu perekonomian masyarakat kecil yang berada di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu kemudian penulis tertarik

⁵ Achmad Farikhy dkk, *Koperasi dan UMKM*, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, (Surabaya: 2009), 173-174.

untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul “**Pengaruh Dukungan Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator dan Katalistaor terhadap Perkembangan Jumlah Koperasi Syariah di Kabupaten Lamongan (periode 2015-2016) (Studi kasus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan dan Koperasi Syariah di Lamongan)**”. Dimana penulis ingin tahu bagaimana pengaruh dari dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan koperasi syariah di Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh dukungan pemerintah daerah sebagai fasilitator terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016 ?
2. Bagaimana Pengaruh dukungan pemerintah daerah sebagai katalisator terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam proposal penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaruh dukungan pemerintah daerah sebagai fasilitator terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016.

2. Untuk mengetahui Pengaruh dukungan pemerintah daerah sebagai katalisator terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diharapkan mempunyai manfaat:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016.

2. Bagi Pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan suatu wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah di Kabupaten Lamongan periode 2015-2016.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Syariah.

4. Bagi Lembaga atau Pemerintah Lamongan yang terkait

Sebagai masukan mengenai pengaruh dukungan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan katalisator terhadap perkembangan jumlah koperasi syariah kabupaten Lamongan periode 2015-2016.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk menganalisis atau untuk kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Mas Fitri Chandni Aliyah Ismawati Dengan judul “Efektifitas Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan”. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian tersebut menggunakan metode jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (pendeskripsi subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Jumlah Koperasi Syariah di Kabupaten Lamongan” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai landasan teori yang menguraikan tentang kajian teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menyajikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV : Hasil Pembahasan

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.